

## Keseimbangan APBN dalam Konteks Pembangunan dan Pengelolaan Utang Negara

Crisdayanti Sinaga \*<sup>1</sup>  
Dina Claudia Purba <sup>2</sup>  
Salsabilla Putri Lisari <sup>3</sup>  
Seftika Syafila <sup>4</sup>  
Wahjoe Pangestoeti <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji

\*e-mail: [csinaga@student.umrah.ac.id](mailto:csinaga@student.umrah.ac.id), [dclaudiapurba@student.umrah.ac.id](mailto:dclaudiapurba@student.umrah.ac.id),  
[sputrilisari@student.umrah.ac.id](mailto:sputrilisari@student.umrah.ac.id), [ssyafila@student.umrah.ac.id](mailto:ssyafila@student.umrah.ac.id), [wahjoepangestoeti@umrah.ac.id](mailto:wahjoepangestoeti@umrah.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini membahas kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, dampak kebijakan fiskal terhadap pembangunan, strategi pengelolaan utang, dan keseimbangan APBN yang ideal. Pendapatan negara pada 2022 mencapai Rp2.626,4 triliun, meningkat 30,6% dibandingkan 2021, sementara belanja strategis dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Rasio defisit terhadap PDB menurun menjadi di bawah 3% pada 2023 setelah melonjak selama pandemi. Kebijakan fiskal mendorong realisasi investasi infrastruktur sebesar Rp2.400 triliun (2019–2023), meningkatkan anggaran pendidikan hingga Rp612 triliun pada 2023, dan menopang pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% pascapandemi. Pengelolaan utang difokuskan pada optimalisasi struktur, penerbitan obligasi hijau, dan pengendalian biaya utang yang mencapai Rp441 triliun pada 2023. Studi kasus Malaysia dan Thailand menunjukkan efisiensi fiskal dan diversifikasi pendapatan sebagai kunci keberhasilan. Rekomendasi meliputi reformasi perpajakan dan optimalisasi sektor digital untuk menciptakan kebijakan fiskal berkelanjutan. Penelitian ini menyoroti pentingnya APBN yang strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

**Kata Kunci:** APBN, kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur, pengelolaan utang, pertumbuhan ekonomi.

### Abstract

*This study discusses the condition of Indonesia's State Budget (APBN), the impact of fiscal policy on development, debt management strategies, and the ideal APBN balance. State revenue in 2022 reached IDR2,626.4 trillion, an increase of 30.6% compared to 2021, while strategic spending was allocated to infrastructure, education, and health. The deficit-to-GDP ratio declined to below 3% in 2023 after spiking during the pandemic. Fiscal policy encourages the realisation of infrastructure investment of IDR2,400 trillion (2019-2023), increases the education budget to IDR612 trillion by 2023, and sustains economic growth averaging 5% post-pandemic. Debt management is focused on optimising the structure, issuing green bonds, and controlling debt costs, which will reach IDR441 trillion by 2023. Case studies of Malaysia and Thailand point to fiscal efficiency and revenue diversification as keys to success. Recommendations include tax reform and digital sector optimisation to create a sustainable fiscal policy. This research highlights the importance of a strategic state budget to support long-term economic growth.*

**Keywords:** State budget, fiscal policy, infrastructure development, debt management, economic growth

## PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN memuat daftar rencana pendapatan dan belanja negara secara sistematis dan rinci pada tahun anggaran (periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember). Tujuan pembentukan APBN adalah untuk menjamin terciptanya keseimbangan dinamis dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, yang pada akhirnya mencapai peningkatan output, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan produktivitas relatif. Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Lona dkk., 2023).

Salah satu hal yang menjadi perhatian penting dalam perkembangan sebuah Negara adalah anggaran pendapatan dan belanja. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai instrumen utama pengelolaan sumber daya keuangan negara, APBN berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang. Dengan alokasi anggaran yang tepat, APBN mendukung program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Misalnya, dalam APBN 2024, pemerintah mengalokasikan Rp 493,5 triliun untuk program perlindungan sosial dan Rp 422,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur (Mij, 2023).

Namun, meningkatnya beban utang negara menjadi isu yang harus dikelola dengan hati-hati dalam pengelolaan APBN. Kebutuhan pembiayaan defisit anggaran dan proyek pembangunan sering kali menjadi alasan utama kenaikan utang negara. Walaupun utang dapat menjadi instrumen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengelolaannya yang kurang bijak dapat mengancam stabilitas fiskal. Untuk tahun 2024, dengan total anggaran mencapai Rp3.325,11 triliun, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki dampak positif terhadap perekonomian tanpa membebani generasi mendatang dengan utang yang tidak terkendali. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan keberlanjutan ekonomi Indonesia di masa depan (Satya, 2015).

Stabilitas fiskal adalah elemen mendasar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang efisien serta akuntabel. Kebijakan fiskal yang berkelanjutan bertujuan untuk mempertahankan defisit anggaran dalam batas aman guna memastikan utang negara tetap terkendali. Pentingnya langkah ini terletak pada potensi dampak negatif dari defisit anggaran yang berkepanjangan, seperti meningkatnya beban utang dan ancaman terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang (Harahap dkk., 2023).

Integrasi antara pembangunan dan manajemen utang menghadirkan tantangan yang kompleks. Pemerintah perlu mengalokasikan investasi besar untuk infrastruktur dan program sosial guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, pengeluaran tersebut harus dikelola dengan hati-hati agar tidak memicu lonjakan utang yang tidak terkendali.

Menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan tantangan utama bagi pemerintah Indonesia, terutama dalam memastikan pembangunan berkelanjutan tanpa memperbesar beban utang negara. Salah satu indikator utama kesehatan fiskal adalah keseimbangan primer, yaitu selisih antara total pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Pada tahun 2023, Indonesia mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp92,2 triliun, yang menjadi pencapaian pertama setelah 12 tahun mengalami defisit (Juanda & Gladiola, 2022).

Pendapatan negara yang kuat menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan APBN. Pada tahun 2023, pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun, melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBN. Pertumbuhan ini didorong oleh reformasi perpajakan dan upaya peningkatan *tax ratio*. Pemerintah diharapkan terus memperbaiki kebijakan perpajakan dan sistem administrasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas fiskal (Hartanti dkk., 2024).

Pengendalian belanja negara juga berperan penting dalam mencapai keseimbangan APBN. Belanja negara pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp3.121,9 triliun, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Fokus utama pengeluaran adalah pada belanja yang produktif dan efisien, seperti program yang meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong stabilitas ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa belanja diarahkan untuk program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat tanpa meningkatkan risiko utang secara signifikan (Kemenkeu, 2024).

Konsolidasi fiskal menjadi langkah strategis lainnya dalam menjaga keseimbangan APBN. Dengan defisit APBN sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65% dari Produk Domestik Bruto (PDB), pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan anggaran yang disiplin. Konsolidasi ini

melibatkan penataan struktur belanja untuk lebih responsif terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim dan konflik geopolitik, serta memastikan bahwa kebijakan fiskal mendukung keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan fiskal dalam konteks pengelolaan utang dan pembangunan serta memberikan rekomendasi strategi untuk mencapai keseimbangan APBN. Kebijakan fiskal di Indonesia berperan penting dalam mengelola perekonomian, terutama dalam menghadapi tantangan seperti resesi. Penelitian ini akan membahas bagaimana kebijakan fiskal dapat mempengaruhi pengelolaan utang dan pembangunan, serta strategi yang dapat diimplementasikan untuk mencapai keseimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder untuk memahami tren keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta strategi pengelolaan utang negara dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Data yang digunakan bersumber dari dokumen resmi seperti laporan APBN yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, publikasi dan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan Bank Indonesia. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan publikasi internasional, seperti laporan IMF dan World Bank, untuk memberikan perspektif perbandingan global. Rentang data yang dianalisis mencakup 5 tahun terakhir (2019–2023), guna memastikan relevansi dan akurasi temuan. Dan dengan perhatian khusus pada periode pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap kebijakan fiskal. Sumber data ini dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang tren pendapatan dan belanja negara, keseimbangan primer, serta dinamika utang pemerintah selama krisis dan pasca-krisis.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tren fiskal untuk mengidentifikasi pola dan perubahan dalam komponen utama APBN, seperti pendapatan negara, belanja negara, dan defisit anggaran, terutama selama periode pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kebijakan pengelolaan utang dengan membandingkan rasio utang terhadap PDB, biaya bunga utang, dan strategi konsolidasi fiskal. Hasil dari analisis ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan fiskal dapat mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tanpa meningkatkan risiko fiskal jangka panjang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia**

#### **1. Pendapatan Negara**

Tren penerimaan negara menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2019–2023. Pada tahun 2022, total penerimaan negara mencapai Rp2.626,4 triliun, meningkat sebesar 30,6% dibandingkan dengan tahun 2021 (Kemenkeu, 2024). Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk pemulihan ekonomi pascapandemi, reformasi perpajakan, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pajak tetap menjadi komponen utama pendapatan negara, didukung oleh kontribusi signifikan dari bea cukai dan PNBP.

Lebih rinci, reformasi perpajakan yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Di sisi lain, peningkatan harga komoditas global, seperti batu bara dan minyak kelapa sawit, turut memberikan dorongan besar terhadap penerimaan bea keluar dan royalti yang masuk dalam PNBP. Hal ini menandakan adanya peran strategis sektor komoditas dalam menopang pendapatan negara (Kemenkeu, 2022).

#### **2. Belanja Negara**

Alokasi belanja negara terus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2023, belanja pemerintah pusat untuk infrastruktur dialokasikan sebesar Rp392 triliun (Nota Keuangan APBN., 2023). Alokasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan fisik yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, seperti pembangunan jalan tol, jaringan irigasi, dan infrastruktur digital.

Belanja pendidikan juga menjadi prioritas utama, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan alokasi minimal 20% dari APBN. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan, dan pelatihan guru. Sementara itu, belanja kesehatan diarahkan untuk memperkuat sistem layanan kesehatan, termasuk vaksinasi COVID-19, penyediaan obat-obatan, serta pengembangan infrastruktur rumah sakit dan puskesmas.

### 3. Defisit APBN

Defisit APBN menunjukkan tren penurunan yang signifikan setelah mengalami lonjakan akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, rasio defisit terhadap PDB mencapai 6,09% karena kebutuhan belanja besar untuk penanganan pandemi dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun, pada tahun 2023, rasio defisit berhasil ditekan kembali di bawah 3%, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memberikan relaksasi defisit sementara.

Penurunan defisit ini mencerminkan keberhasilan strategi konsolidasi fiskal yang dijalankan pemerintah. Pengendalian belanja, optimalisasi pendapatan, dan reformasi struktural menjadi pilar utama untuk menciptakan APBN yang lebih sehat dan berkelanjutan. Namun, tantangan tetap ada, seperti potensi ketidakpastian ekonomi global yang dapat memengaruhi target penerimaan negara dan kebutuhan belanja mendesak.

#### b. Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Pembangunan

##### 1. Pembangunan Infrastruktur

Kebijakan fiskal yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur telah memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan integrasi wilayah. Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti pembangunan jalan tol Trans-Jawa, pelabuhan, dan bandara menjadi prioritas utama dalam mendorong konektivitas antarwilayah. Data dari Bappenas (2023) mencatat bahwa realisasi investasi infrastruktur selama periode 2019–2023 mencapai Rp2.400 triliun.

Proyek-proyek tersebut telah berhasil meningkatkan efisiensi logistik nasional dengan menurunkan biaya transportasi dan waktu tempuh, sekaligus membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil. Misalnya, jalan tol Trans-Jawa yang menghubungkan berbagai kota besar di Pulau Jawa berkontribusi pada pengurangan waktu distribusi barang serta peningkatan produktivitas ekonomi di sektor perdagangan dan industri.

Namun, tantangan seperti pembebasan lahan, koordinasi antarinstansi, dan kebutuhan dana yang besar masih menjadi kendala yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP) perlu terus ditingkatkan.

##### 2. Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN setiap tahun sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi dasar bagi penguatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2023, alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp612 triliun,

yang dialokasikan untuk berbagai program seperti peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah, pemberian beasiswa, dan pengembangan pendidikan vokasi.

Sementara itu, sektor kesehatan juga mendapat perhatian besar melalui kebijakan fiskal. Peningkatan anggaran kesehatan difokuskan pada penguatan layanan kesehatan primer, vaksinasi massal, dan pembangunan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Dampak dari alokasi ini terlihat pada peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar dan penurunan angka kematian ibu dan anak.

Meski alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan sudah cukup besar, tantangan tetap ada, terutama terkait kualitas output yang dihasilkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar negara-negara maju, yang memerlukan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan terukur.

### 3. Kinerja Ekonomi

Kebijakan fiskal yang ekspansif selama masa pemulihan pandemi terbukti berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 5% per tahun pascapandemi COVID-19. Kinerja positif ini didukung oleh konsumsi domestik yang pulih, investasi infrastruktur yang meningkat, dan kontribusi sektor ekspor yang menguat akibat tingginya harga komoditas global (Hari Santoso dkk., 2021).

Selain itu, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang didanai oleh APBN memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mendukung keberlangsungan usaha kecil dan menengah (UMKM). Hal ini tidak hanya membantu mengurangi dampak sosial-ekonomi pandemi tetapi juga mempercepat pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

Namun, tantangan eksternal seperti volatilitas ekonomi global dan ketegangan geopolitik dapat memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang fleksibel dan adaptif tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

#### c. Strategi Pengelolaan Utang

##### 1. Struktur Utang Negara

Struktur utang negara Indonesia didominasi oleh utang domestik, yang memberikan keuntungan berupa stabilitas terhadap risiko nilai tukar serta peningkatan partisipasi investor dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2023), rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per September 2023 berada di angka 39,1%, masih di bawah batas aman yang ditetapkan sebesar 60% sesuai dengan UU Keuangan Negara.

Komposisi utang domestik yang lebih besar menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Di sisi lain, utang luar negeri tetap dipertahankan pada tingkat yang terkendali untuk mendukung pendanaan proyek-proyek strategis, terutama yang memerlukan teknologi dan investasi dari luar negeri. Namun, dinamika global seperti fluktuasi suku bunga dan nilai tukar menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas utang.

##### 2. Pengelolaan Risiko Utang

Pengelolaan risiko utang dilakukan melalui diversifikasi instrumen utang, salah satunya dengan penerbitan obligasi hijau (*green bond*). Obligasi ini dirancang untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pelestarian lingkungan. Strategi ini tidak hanya membantu mengurangi risiko

pembiayaan, tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang menjadi salah satu prioritas global.

Indonesia telah menerbitkan beberapa green bond yang menarik perhatian investor internasional, mengingat komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dan mengatasi perubahan iklim. Hal ini menciptakan peluang untuk mengakses pendanaan dengan biaya yang lebih rendah sekaligus memperkuat citra Indonesia di pasar internasional sebagai negara yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

### 3. Biaya Utang

Biaya bunga utang pada tahun 2023 mencapai Rp441 triliun, setara dengan 14% dari total belanja APBN (Segara & Ibnu Prakoso, 2023). Tingginya biaya bunga ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat tekanan terhadap ruang fiskal yang bisa digunakan untuk belanja prioritas lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Untuk menekan biaya utang, pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti memperpanjang tenor utang, mengoptimalkan penerbitan obligasi domestik, serta memanfaatkan kondisi pasar global yang menguntungkan melalui penerbitan sukuk internasional dan green bond. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa beban pembayaran utang tetap terkendali dalam jangka panjang tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

#### d. Keseimbangan APBN yang Ideal

##### 1. Indikator Keseimbangan

Keseimbangan primer merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesehatan fiskal suatu negara. Pada tahun 2022, Indonesia berhasil mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp132 triliun, yang menunjukkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban belanja tanpa bergantung pada utang baru (Kemenkeu, 2024).

Surplus ini didorong oleh peningkatan pendapatan negara yang signifikan, terutama dari sektor pajak dan PNBPN, serta pengelolaan belanja yang lebih efisien. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan konsolidasi fiskal pascapandemi COVID-19, meskipun masih diperlukan upaya untuk menjaga keberlanjutan surplus dalam jangka panjang.

##### 2. Pembelajaran dari Negara Lain

Studi kasus dari Malaysia dan Thailand memberikan pembelajaran penting dalam mencapai keseimbangan fiskal yang ideal.

a. Malaysia: Negara ini berhasil menekan rasio utang terhadap PDB melalui efisiensi fiskal, seperti optimalisasi subsidi dan pengurangan pemborosan dalam belanja publik. Selain itu, Malaysia menerapkan pajak barang dan jasa (GST) yang meningkatkan pendapatan negara secara signifikan sebelum akhirnya digantikan oleh SST (*Sales and Services Tax*).

b. Thailand: Thailand mengadopsi inovasi pembiayaan melalui obligasi ritel yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat basis pembiayaan domestik tetapi juga mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Kedua negara ini menunjukkan bahwa efisiensi fiskal dan diversifikasi pendapatan merupakan kunci utama untuk menjaga stabilitas fiskal dan menciptakan ruang fiskal yang lebih besar bagi pembangunan.

### 3. Rekomendasi Kebijakan

Untuk menciptakan keseimbangan APBN yang ideal, Indonesia perlu fokus pada beberapa rekomendasi kebijakan berikut:

a. Peningkatan Basis Pajak melalui Reformasi Perpajakan: Reformasi perpajakan harus terus dilanjutkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak. Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi langkah awal yang penting, tetapi upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengintegrasikan sistem perpajakan digital dan mengatasi praktik penghindaran pajak.

b. Diversifikasi Sumber Pendapatan: Dengan meningkatnya peran ekonomi digital, pemerintah dapat memanfaatkan potensi ini sebagai sumber pendapatan baru, misalnya melalui pajak *e-commerce* dan platform digital. Selain itu, sektor-sektor nontradisional seperti energi terbarukan dan ekonomi kreatif juga perlu dikembangkan untuk memperluas basis penerimaan negara.

Efisiensi dalam Belanja Publik untuk Pengelolaan belanja yang lebih efisien, terutama melalui digitalisasi dan pengawasan yang lebih ketat, akan membantu mengurangi kebocoran anggaran dan meningkatkan nilai tambah dari setiap alokasi belanja.

e. Visualisasi Data untuk Analisis APBN dan Utang Negara

Visualisasi data memainkan peran penting dalam mendukung analisis dan narasi terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta struktur utang negara. Penyajian data dalam bentuk grafik dan tabel memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami tren dan komposisi keuangan negara secara lebih komprehensif.

a) Grafik Tren Defisit APBN 2019–2023: Grafik tren defisit APBN dari tahun 2019 hingga 2023 menyajikan gambaran fluktuasi kondisi keuangan negara selama periode tersebut. Lonjakan defisit pada tahun 2020, misalnya, mencerminkan dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan pendapatan negara dan peningkatan belanja untuk penanganan kesehatan serta pemulihan ekonomi. Dengan visualisasi grafik, analisis dapat diarahkan pada faktor utama yang memengaruhi perubahan defisit, seperti kebijakan fiskal yang diterapkan atau dinamika ekonomi global yang berdampak pada penerimaan pajak. Data ini juga memberikan wawasan tentang sejauh mana pemerintah mengandalkan utang untuk menutupi defisit, yang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir (Ratag dkk., 2018).

b) Tabel Komposisi Utang Negara Tabel yang menunjukkan komposisi utang negara sangat berguna untuk memaparkan detail struktur utang pemerintah. Tabel ini dapat mencakup informasi tentang total utang, proporsi utang dalam mata uang domestik dan asing, serta jenis instrumen utang, seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Sebagai contoh, hingga Oktober 2023, total utang Indonesia tercatat sebesar Rp7.950 triliun, dengan SBN berkontribusi 88,66% dari total utang. Penyajian data dalam bentuk tabel mempermudah perbandingan proporsi dan jenis utang, serta memungkinkan evaluasi risiko yang terkait, seperti fluktuasi nilai tukar dan suku bunga yang dapat memengaruhi kapasitas pemerintah dalam mengelola utang secara berkelanjutan (Ratag dkk., 2018).

## KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia dalam periode 2019–2023 berhasil memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, meskipun menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19. Pendapatan negara menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun 2022, didorong oleh reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Di sisi lain, belanja

negara tetap diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang menjadi prioritas utama pemerintah.

Defisit APBN yang melonjak pada 2020 akibat kebutuhan stimulus fiskal berhasil dikendalikan hingga kembali berada di bawah 3% PDB pada 2023. Strategi pengelolaan utang yang berbasis risiko, termasuk penerbitan obligasi hijau, turut mendukung keberlanjutan fiskal sambil mendanai pembangunan berkelanjutan. Rasio utang terhadap PDB tetap terjaga pada tingkat yang aman, dengan biaya bunga utang yang dikelola secara efisien.

Pengaruh kebijakan fiskal terhadap pembangunan terlihat dari pencapaian signifikan dalam proyek strategis nasional, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% APBN, dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di kisaran 5% pasca pandemi. Namun, upaya diversifikasi sumber pendapatan, terutama melalui sektor digital, serta peningkatan basis pajak masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang.

Sebagai pembelajaran, pengalaman dari negara lain seperti Malaysia dan Thailand dalam efisiensi fiskal dan inovasi pembiayaan dapat menjadi rujukan penting. Oleh karena itu, reformasi perpajakan yang lebih luas, optimalisasi belanja negara, dan pengelolaan utang yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mewujudkan APBN yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. N., Dailibas, D., Nasution, R., Chaerudin, C., & Muslihat, A. (2023). Dampak Stabilitas Keuangan Daerah terhadap Ketahanan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 20(1), 21–30. <https://doi.org/10.35384/jkp.v20i1.499>
- Hari Santoso, D., Putri Cahyo Utami, N., & Yoga Paramartha, D. (2021). *Hasil Survei Kegiatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid 19*. BADAN PUSAT STATISTIK RI. <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/12/20/6f33d7296975e65db707fade/hasil-survei-kegiatan-usaha-pada-masa-pandemi-covid-19.html>
- Hartanti, A., Basriwijaya, A. D., & Munthe, H. V. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA AKIBAT PERUBAHAN INFLASI DI INDONESIA PADA TAHUN 2019- 2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(10), 573–584.
- Juanda, B., & Gladiola, S. (2022). ANALISIS KEBERLANJUTAN SERTA PENGARUH SURAT BERHARGA NEGARA DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 7(3), 239–254.
- Kemenkeu. (2024). *Menteri Keuangan Sampaikan Pokok-Pokok RUU P2 APBN 2023 kepada Banggar DPR* [Kementerian Keuangan Republik Indonesia]. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Banggar-DPR-RUU-P2-APBN-2023>
- Lona, S. S., Perseveranda, M. E., & Manafe, H. A. (2023). Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja. *Owner*, 7(1). <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1486>
- Mij. (2023). *Peran Apbn perkuat Fondasi Transformasi ekonomi Ri* [CNBC Indonesia]. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230927154833-4-476073/peran-apbn-perkuat-fondasi-transformasi-ekonomi-ri>

- Nota Keuangan APBN. (2023). *UU APBN Dan Nota Keuangan*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/keuangan-negara/uu-apbn-dan-nota-keuangan>
- Ratag, M. C., Kalangi, J. B., & Mandei, D. (2018). ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, DEFISIT ANGGARAN, DAN TINGKAT KURS TERHADAP UTANG LUAR NEGERI INDONESIA (PERIODE TAHUN 1996-2016). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01).
- Satya, V. E. (2015). *ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN UTANG NEGARA: MANAJEMEN UTANG PEMERINTAH DAN PERMASALAHANNYA*. 20(1).
- Segara, B., & Ibnu Prakoso, R. (2023). *Informasi APBN 2023, Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*. Tim Kementerian Keuangan. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>